

## PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang memadai. Lebih jauh LAKjIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara lengkap dan menyeluruh segenap aspek yang menyangkut rencana dan program kerja pada masing-masing bidang yang dilaksanakan oleh pelaku aktivitas, namun kami berharap data dan informasi yang tersaji dalam laporan ini dapat menjadi referensi dalam melaksanakan evaluasi dan perumusan kegiatan dimasa yang akan datang. Semoga LAKjIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini membawa manfaat yang positif bagi jajaran aparat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Dimasa mendatang, sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini.

Padang Panjang, Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOTA PADANG PANJANG**



**I PUTU VENDA, S.STP, M.Si**  
Nip.19770522 199511 1 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)**

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu kepala daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang pada tahun 2019 dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang disusun sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah disetujui dengan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan kinerja pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) sebesar Rp. 9.025.818.700,- dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 8.652.552.880,- atau (95,86 %).

Disamping itu Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang juga merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Retribusi Daerah berupa retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi izin trayek, dengan target pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.766.387.500,- dan telah tercapai sebesar Rp.1.300.864.700,- dengan presentase sebesar 73.65%.

Dari hasil pencapaian kinerja tahun 2019 secara umum menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal - hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya manusia meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi akhir kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2019 secara keseluruhan memuaskan.

Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Semoga segala upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, handal, profesional guna terwujudnya kenyamanan transportasi dan masyarakat informasi di Kota Padang Panjang.

Demikian ikhtisar eksekutif ini kami sampaikan dan secara lengkap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana terlampir.

## DAFTAR ISI

Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis Organisasi	6
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Organisasi	6
E. Struktur Organisasi	7
F. Sumber Daya Manusia	9

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Misi	11
B. Tujuan	11
C. Sasaran	11
D. Indikator Kinerja	12
E. Strategi dan Kebijakan	14
F. Program dan Kegiatan	14

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	22

BAB IV PENUTUP	27
----------------	----



**A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

**B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi
4. Bidang Angkutan dan Perparkiran
5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan

yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari :

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

### **2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perhubungan.

## **3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi,**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas dan akreditasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan akreditasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bimbingan keselamatan dan pengendalian lalu lintas dan operasional.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program manajemen rekayasa lalu lintas; dan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana lalu lintas dan akreditasi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi terdiri dari :

### **1) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program bimbingan keselamatan dan pengendalian lalu lintas dalam arti melaksanakan perencanaan, bimbingan keselamatan bagi pengendara kendaraan, pengguna jalan, pengaturan di bidang lalu lintas, secara teknis, analisis daerah rawan kecelakaan dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di jalan, penetapan kecepatan maksimal kendaraan dan larangan menggunakan jalan.

Fungsi Seksi Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional, adalah :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang keselamatan dan pengendalian lalu lintas dan operasional;
- b) Penyelenggara kegiatan bidang bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;

### **2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Fungsi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah :

- a) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

### **3) Seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program sarana prasarana lalu lintas dalam arti merencanakan, menyiapkan serta melakukan pengadaan seluruh sarana prasarana lalu lintas, serta menyelenggarakan program akreditasi dalam arti merencanakan, menyiapkan bahan pengendalian kelaikan kendaraan



bermotor, melakukan pemantauan bimbingan teknis dan operasional, analisis penilaian terhadap pengoperasian kendaraan bermotor dan melakukan evaluasi hasil kelaikan kendaraan.

Fungsi Seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi, adalah :

- a) Perencanaan program kegiatan urusan seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi;
- b) Pelaksanaan program kegiatan seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi.

#### **4. Bidang Angkutan dan Perparkiran**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan dan Perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan dan perparkiran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang angkutan orang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pengendalian; dan
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang terminal dan perparkiran.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang angkutan jalan terdiri dari :

##### **1) Seksi Angkutan**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan.

Fungsi Seksi Angkutan, adalah :

- b) Perencanaan program kegiatan urusan seksi angkutan;
- c) Pelaksanaan program kegiatan angkutan;
- d) Pembagian pelaksanaan tugas seksi angkutan;
- e) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan seksi angkutan.

##### **2) Seksi Pendataan dan Pengendalian**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan terhadap semua yang ada pada Dinas Perhubungan, serta mengendalikan pengelolaan angkutan

dalam arti dan melakukan pembinaan, pengawasan dan memproses pemberian perizinan terhadap penyelenggaraan angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Pendataan dan Pengendalian, adalah :

- a) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pendataan dan Pengendalian.

### **3) Seksi Terminal dan Perparkiran**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan terminal dan perparkiran dalam arti merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penggunaan terminal, halte, dan tempat parkir, memproses kegiatan pengadaan, penetapan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengaman rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di jalan daerah, pembangunan, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan terminal, halte, tempat penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas serta mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di Bidang Sarana dan Prasarana.

Fungsi Seksi Terminal dan Perparkiran, adalah :

- a) Perencanaan program kegiatan urusan terminal dan perparkiran;
- b) Pelaksanaan program kegiatan urusan terminal dan perparkiran;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas terminal dan perparkiran;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi terminal dan perparkiran.

### **5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.

- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

### **C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Perhubungan memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perhubungan. Kota Padang Panjang yang relatif kecil dari kota-kota lainnya memiliki keunikan dan khas tersendiri, karena Kota Padang Panjang adalah kota yang menjadi jalur perlintasan yang cukup ramai dilalui dan dikunjungi, sehingga hal ini menjadikan perhatian yang khusus dalam hal kenyamanan dan keamanan lalu lintas daratnya.

Padang Panjang memiliki jalur jalan raya kota dan propinsi sepanjang 105,64 KM yang menjadi salah satu perhatian bagi Dinas perhubungan dalam mewujudkan pelayanan angkutan dan ketertiban lalu lintas. Melalui Dinas Perhubungan diharapkan pelayanan angkutan dan ketertiban lalu lintas baik sarana maupun prasarana yang merupakan aspek strategis organisasi dapat terwujud .

### **D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, menemui permasalahan utama (strategic issued), baik itu di Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, serta Bidang Angkutan dan Perpakiran adalah sebagai berikut :

#### **a. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi menemui berbagai permasalahan yang meliputi :

- 1) Masih rendahnya pemahaman pengguna jalan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Masih rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan dan keselamatan lalu lintas;
- 3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi;
- 4) Masih kurangnya kebutuhan fasilitas lalu lintas seperti rambu, RPPJ, guadril, cermin tikung, speed bump dan marka jalan, dll;
- 5) Masih kurangnya sarana untuk mobilisasi.

#### **b. Bidang Angkutan dan Perpajakan**

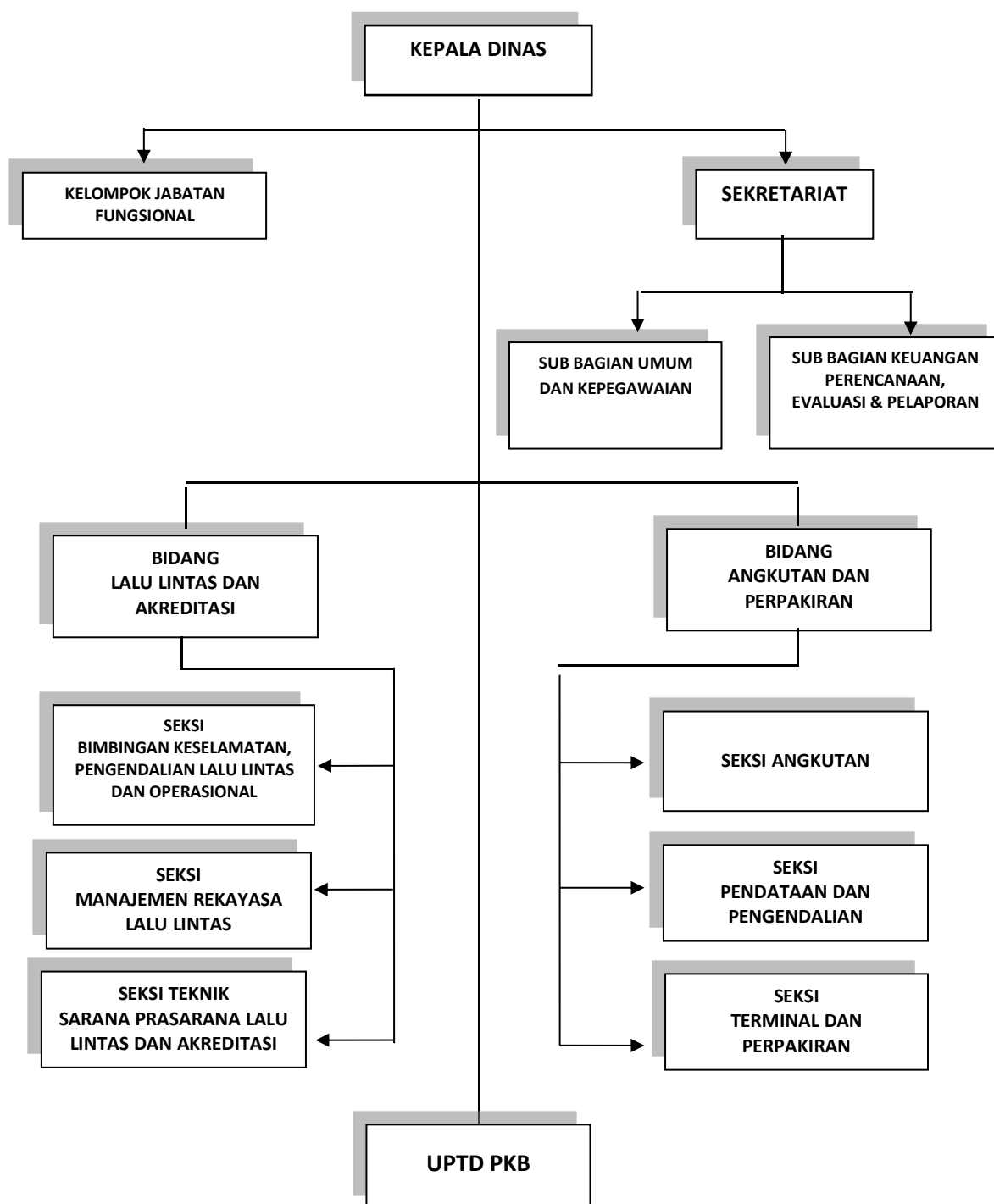
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Angkutan dan Perpajakan menemui berbagai permasalahan yang meliputi :

- 1) Masih rendahnya kemampuan angkutan kota dalam memberikan pelayanan sesuai izin trayek yang telah dikeluarkan;
- 2) Rendahnya kemampuan pemilik kendaraan menyediakan angkutan penumpang representatif yang berdaya saing;
- 3) Munculnya angkutan tidak dalam trayek (online) yang menjadi saingan berat bagi angkutan kota;
- 4) Belum tersedianya tempat parkir yang layak dan memadai serta bernilai ekonomi;
- 5) Belum memadainya sarana dan prasarana pangkalan angkutan barang.

#### **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Gambar. 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat**  
**Tahun 2019**

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
Kepala	1					1	1
Sekretariat	11	2		5	8	-	13
Bid. Lalu Lintas	16	-		10	5	1	16
Bid. Angkutan	14			7	7		14
UPTD PKB	4	1		2	3		5
Jumlah	46	3		24	23	2	49

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2019**

Unit Kerja	SD-SLTP	SLTA	D2 – D3	S1	S2	Jumlah
Kepala					1	1
Sekretariat	1	5	3	4	-	13
Bid. Lalu Lintas	2	9	-	5	-	16
Bid. Angkutan	1	8	1	3	1	14
UPTD PKB	-	2	2	1	-	5
Jumlah	4	24	6	13	2	49

Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih belum memadai menurut hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 49 orang ASN.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia ASN yang ada untuk

mengenyam pendidikan dan latihan kualifikasi teknis di bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Data Kualifikasi Teknis**  
**Yang Dibutuhkan pada Dinas Perhubungan**

Kualifikasi	Kondisi Riil	Jumlah Ideal	Kurang
Penguji	4	8	4
PPNS	2	4	2
D.IV Transportasi Darat	2	6	4
D.III Ahli LLAJ	-	12	12
Jumlah	8	30	22

Guna meningkatkan layanan khusus formasi yang tidak dapat diisi oleh ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perhubungan, melalui kegiatan-kegiatan yang mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 1.4

**Tabel 1. 4**  
**Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan**  
**Tahun 2019**

Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
Sekretariat	Administrasi perkantoran	2
	Sopir	4
	Pengaja Malam	1
	Tenaga kebersihan	5
Bidang Lalu Lintas	Tenaga Bantuan Lalu Lintas	11
Bidang Angkutan	Petugas TPR	2
	Pemungut Retribusi Parkir	8
UPTD PKB	Penjaga malam	1
	Petugas Kebersihan	1
Jumlah		35

**A. MISI**

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yakni :

**“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermanwah dan Bermartabat”**

diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Adapun misi Dinas Perhubungan senada dengan Misi 1 Kota padang Panjang adalah :

**“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”**

**B. TUJUAN**

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaran urusan perhubungan mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya yang berpijak pada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 yakni :

**“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan”**

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

**C. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

- 1. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas;**
- 2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan.**



**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Untuk Kejayaan Kota Padang panjang yang bermartabat dan Bermartabat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	a. Jumlah Kecelakaan
			Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	a. Persentase panjang trayek jalan terlayani b. Persentase Kendaraan Lulus Uji Keur

#### D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan**

No	Indikator	Target	Rumus yang digunakan
		Tahun 2019	
1	2	4	6
1	Jumlah Kecelakaan	37	Jumlah kecelakaan tahun n
2	Persentase panjang trayek jalan terlayani	27,02%	Jumlah panjang jalan trayek tahun n dibagi jumlah total panjang jalan tahun n dikali 100 persen
3	Persentase Kendaraan Lulus Uji Keur	97,56%	Jumlah kendaraan lulus uji keur tahun n dibagi jumlah taman kendaraan tahun n dikali 100 persen

Indikator kinerja Sasaran Daerah merupakan salah satu indikator pendukung penghitungan sasaran daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Sasaran Daerah Urusan Perhubungan**

No	Indikator	Target	Rumus yang digunakan
		Tahun 2019	
1	2	4	6
1	Persentase Perlengkapan Fasilitas Keselamatan	80,40%	Jumlah total persentase fasilitas keselamatan tahun n dibagi jumlah jenis faskes tahun n dikali 100 persen

Indikator kinerja utama Dinas perhubungan juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas perhubungan Tahun 2019, seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

**Dinas Perhubungan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	a. Jumlah Kecelakaan	37
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan	a. Persentase panjang trayek jalan terlayani	27,02%
		b. Persentase Kendaraan Lulus Uji Keur	97,56%

Program		Anggaran
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	151.050.000,-
2.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	170.030.000,-
3.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	868.474.700,-
4.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	581.750.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>1.771.304.700,-</b>

## G. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Perhubungan tahun 2019 adalah melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan pelayannya angkutan umum serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Arah Kebijakan yang merupakan upaya untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan sehingga dari kebijakan kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan.

**Tabel 2.5**  
**Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan**

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Lalu Lintas	Meningkatkan kualitas sarana prasarana lalu lintas, pengamanan dan pengendalian lalu lintas	1. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas 2. Mengadakan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan pelayanan angkutan	1. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan. 2. Mengadakan operasi penegakan hukum atas pelanggaran dokumen angkutan barang/orang.

## H. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2019 telah dapat melaksanakan 8 (Delapan) program dengan 30 (Tiga Puluh) kegiatan, diantaranya :

- ◆ Program Umum adalah program rutin yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan baik internal maupun eksternal

- ◆ Program Urusan Perhubungan adalah program-program yang menjadi urusan Dinas Perhubungan secara keseluruhan baik fisik maupun non fisik.
- ◆ Program Prioritas adalah program yang mendukung sasaran kinerja Dinas Perhubungan yang menjadi dasar penghitungan indikator kinerja utama perangkat daerah.
- ◆ Program Sasaran Daerah adalah program urusan perhubungan yang mendukung capaian sasarankinerja daerah menjadi dasar penghitungan peningkatan pelayanan infrastruktur yang berkualitas di Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) periode 2018-2023.

Adapun klasifikasi program prioritas dan program sasaran dan program urusan perhubungan dan program umum, sebagai berikut :

**Tabel.2.6**  
**Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019**

No	Program	Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja
UMUM					
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian materai	400 buah
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air, listrik yang dibayarkan	12 bulan
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	15 unit
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan	1 tahun, 8 orang
		5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	25 jenis
		6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan foto copy yang disediakan	2 jenis
		7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	10 jenis
		8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	555 org
		9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan	1 tahun
		10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah honor tenaga administrasi /teknis perkantoran yang dibayarkan	4 orang

No	Program	Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit
		12	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Jumlah alat yang dipelihara/diservice	12 unit
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan bimtek yang diikuti	1 tahun
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	5 Laporan
		15	Penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	3 laporan
<b>URUSAN PERHUBUNGAN/PRIORITAS</b>					
V	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	16	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 Kegiatan
VI	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	17	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji kendaraan yang dipelihara dan dikalibrasi	10 unit
		18	Rehabilitasi pemeliharaan rutin rambu-rambu, traffic, warning light dan marka jalan	Jumlah rambu yang dipelihara	1 tahun
<b>URUSAN PERHUBUNGAN/PRIORITAS</b>					
VII	Peningkatan Pelayanan Angkutan	19	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah upah juru parkir yang dibayarkan	8 orang
		20	Pengendalian disiplin angkutan pengoperasian umum di jalan raya	Jumlah upah tenaga harian lepas dan makan minum harian	1 tahun, 11 Orang
		21	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	10 Buku
		22	Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	80 Orang
		23	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah pengemudi yang mengikuti seleksi	25 Orang
		24	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Jumlah peserta Pelajar Pelopor yang mengikuti seleksi	25 orang
		25	Penertiban dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang	Jumlah pelaksanaan razia	15 hari
<b>URUSAN PERHUBUNGAN/PRIORITAS/SASARAN DAERAH</b>					
VIII	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	26	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah pertemuan forum lalu lintas dan angkutan jalan	3 kali

No	Program	Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja
		27	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu, RPPJ dan cermin tikung	35 unit
		28	Pengadaan Marka Lalu Lintas	Jumlah lokasi marka jalan yang dibuat	2 lokasi
		29	Pengadaan tanggul/speedbump	Jumlah speed bumps yang terpasang	208 set
		30	Pengadaan Guadrail	Jumlah lokasi guadrail yg terpasang	100 meter

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan Tahun 2019 dapat dihitung capaian indikator utama dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## 1. Capaian Indikator Kinerja mengacu RPJMD 2018-2023

Capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 mengacu pada RPJMD 2018-2023 dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2019 dengan realiasi kinerja tahun sebelumnya seperti tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2019**

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Realisasi 2018
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengendalian Pengamanan dan Lalu Lintas	Persentase perlengkapan fasilitas keselamatan	80,40%	80,40%	100%	80,15%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPJMD 2018-2023 pada tahun kedua ini menunjukkan angka capaian yang sangat baik dimana terlihat realisasi kinerja pada tahun 2019 memenuhi target kinerja yang telah ditentukan. Adapun data pendukung pencapaian indikator kinerja Persentasi Perlengkapan Fasilitas Keselamatan, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Data Dasar Indikator Kinerja**  
**Persentase Perlengkapan Fasilitas Keselamatan**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2019**

No	Kegiatan	Pembilang/ Penyebut	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan
1.	Warning Light	$\frac{20}{25} \times 100\%$	80,00%	80,00%	0%
2.	Traffic Light	$\frac{4}{7} \times 100\%$	57,14%	57,14%	0%
3.	Rambu-Rambu	$\frac{705}{877} \times 100\%$	80,39%	79,69%	0,008%
4.	Halte	$\frac{21}{24} \times 100\%$	87,50%	87,50%	0%
5.	Cermin Tikung	$\frac{32}{33} \times 100\%$	96,97%	96,43%	0,005%
<b>Total Persentase kegiatan</b>			<b>80,40%</b>	<b>80,15%</b>	<b>0,31%</b>

- Indikator kinerja program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dari target 80,40% dengan realisasi kinerja 80,40% menunjukkan bahwasanya capaian kinerja dari target adalah 100% dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang telah direncanakan sehingga persentase perlengkapan fasilitas keselamatan pun tercapai. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 80,15 % terjadi kenaikan sebesar 0,31%, dengan adanya penambahan jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas.

Dinas Perhubungan pada Tahun 2019 telah berupaya memenuhi fasilitas lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, sebagai berikut :

- ✓ Warning Light hingga tahun 2019 total warning light yang terpasang 25 unit, dan hanya 20 unit warning light yang berfungsi baik dari 25 unit yang tersedia sehingga capaian kinerja sampai tahun 2019 mencapai 80,00% dengan kinerja bernilai Baik, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 tidak ada perubahan naik/turun.
- ✓ Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas pada suatu persimpangan jalan dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan untuk bergerak secara bergantian dan hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas, hal ini menjadi salah satu sasaran kinerja dengan pengadaan traffic light dimana hingga tahun 2019 sarana Traffic Light terpasang pada 4 lokasi persimpangan titik dalam kondisi baik dari 7 titik lokasi yang terpasang, dan capai kinerja baru 57,14%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 belum ada peningkatan baik dari segi jumlah maupun pun kualitas sarananya.



- ✓ Rambu lalu lintas berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas, dalam hal membentuk kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai termasuk rambu-rambu lalu lintas. Pada tahun 2019 terdapat penambahan pemasangan rambu-rambu pada area pasar pusat kota Padang Panjang sebanyak 28 unit dan pemasangan RPPJ 2 unit di simpang Monas Ngalau sehingga sampai dengan tahun 2019 berjumlah 705 unit dalam keadaan baik dari 877 unit rambu-rambu atau mencapai 80,39%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja 79,69% maka terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 0,008% hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penambahan jumlah rambu – rambu lalu lintas dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai.
- ✓ Hingga tahun 2019 jumlah halte yang tersedia 21 unit dalam kondisi baik dari total 24 unit yang ada dengan capaian kinerja sebesar 87,50%, keberadaan halte ini masih dibutuhkan sebagai salah satu bagian dari prasarana angkutan umum bagi masyarakat Kota Padang Panjang yang sehari-harinya menggunakan jasa angkutan dalam beraktivitas, selain sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dalam kondisi sekarang halte adalah sebagai simpul dan transfer poin bagi pengguna moda transportasi umum.
- ✓ Cermin Tikung merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pemasangan cermin cembung ini masih sangat diharapkan masyarakat dengan kondisi jalan di Kota Padang panjang yang berkelok – kelok dengan kebebasan pandang yang kecil, sampai tahun 2019 capaian kinerja pemasangan ini adalah 32 unit dalam kondisi baik dari 33 unit yang telah terpasang sehingga persentase capaian kinerja mencapai 96,97%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 96,43% terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 0,005%. Melihat kondisi geografis Kota Padang Panjang maka kebutuhan akan cermin tikung cukup tinggi.

## 2. Capaian indikator kinerja utama

Capaian kinerja indikator utama Dinas Perhubungan yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 serta menjadi perjanjian kinerja pimpinan Dinas perhubungan tahun 2019 dengan target dan realisasi pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Angka Kecelakaan	Angka	37	43	1,16	39	0,1
Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	Persentase panjang trayek jalan terlayani	Persen	27,02	27,02	100	27,02	0
	Persentase kendaraan lulus uji keur	Persen	97,56	96,65	99,07	97,14	(0,005)

Dapat dilihat dari tabel diatas adanya realisasi kinerja yang mengalami kenaikan atau penurunan sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja tahun 2019.

### ➤ ***Jumlah Kecelakaan***

Angka kecelakaan yang terjadi di Kota Padang Panjang tahun 2019 mengalami capaian sebesar 1,16% dari target angka kecelakaan sebanyak 37 dengan realisasi kinerja sebanyak 43. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,1% dengan realisasi kinerja sebanyak 39. Faktor naiknya angka kecelakaan pada tahun 2019 lebih dominan dikarenakan kesalahan manusia (human error).

### ➤ ***Persentase panjang trayek jalan terlayani***

Panjang trayek jalan terlayani pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga realisasi kinerja 100%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 pun tidak mengalami perubahan signifikan, karena tidak ada penambahan panjang jalan trayek dari 28,5 Km yang aktif dari total panjang jalan 105,46 Km (27,02%)

### ➤ ***Persentase kendaraan lulus uji keur***

Target indikator ini pada tahun 2019 mengalami capaian sebesar 99,07% dari target persentase kendaraan lulus uji keur 97,56% dengan realisasi kinerja 96,65, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 97,14% maka terjadi penurunan sebesar 0,005%. Namun jika dilihat dari data

kendaraan yang lulus uji keur per jumlah taman kendaraan terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari angka target, dimana target data kendaraan yang lulus uji keur adalah 2078 kendaraan per jumlah taman kendaraan 2130 atau (97,56%) sedangkan realisasi data kendaraan lulus uji keur tahun 2019 sebanyak 2138 kendaraan per jumlah taman kendaraan tahun 2019 sebanyak 2212 kendaraan atau (96,65%).

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas perhubungan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.805.629.305,- (93,96%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.985.918.700,-, sebagai berikut :

### 1. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan sasaran Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 1.771.304.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1656.292.962,- atau sebesar 93,51%, sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Anggaran Program Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Keuangan		Persentase
			Pagu	Realisasi	
Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Angka Kecelakaan	Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	581.750.000,-	557.287.211,-	95,79%
Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	- Persentase panjang trayek jalan terlayani	Peningkatan Pelayanan Angkutan	868.474.700,-	817.323.501,-	94,11%
	- Persentase kendaraan lulus uji keur		321.080.000,-	281.682.250,-	87,73%

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa target program indikator kinerja utama terealisasi dengan capaian bernilai baik, hal ini membuktikan bahwasanya target tercapai untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan serta misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang lebih lanjut diuraikan pada realisasi kinerja program urusan perhubungan tabel 3.6

## 2. Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah

Anggaran program sasaran daerah yang menjadi salah satu indikator penghitungan kualitas infrastruktur berkelanjutan di Kota Padang Panjang Panjang,

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	<b>Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>581.750.000,-</b>	<b>557.287.211,-</b>	<b>95,79</b>
1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	111.600.000,-	106.614.765,-	95,53
2	Pengadaan Marka Jalan	171.350.000,-	170.908.300,-	99,74
3	Pengadaan tanggul/speed bumps	115.950.000,-	115.514.209	99,62
4	Pengadaan Guardrail	182.850.000,-	164.249.937	89,83

Program yang mendukung sasaran daerah pada Dinas Perhubungan adalah Program pengendalian dan pengamanan lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 581.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 557.287.211,- (95,79%), dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

- ✧ Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 35 unit, terdiri dari 28 unit rambu-rambu, 2 unit RPPJ dan 5 unit cermin tikung.
- ✧ Pengadaan marka jalan seluas 633 m dengan panjang marka jalan 6.330 m.
- ✧ Pengadaan tanggul/speedbump sebanyak 208 set pada 18 titik.
- ✧ Pengadaan guardrail sepanjang 100 m.

## 3. Realisasi Anggaran Program Urusan Perhubungan

Anggaran program urusan perhubungan merupakan anggaran yang menjadi dasar perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan dengan target anggaran sebesar Rp. 1.771.304.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.656.292.962,- atau (93.51%), dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Program Urusan Perhubungan**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	<b>Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>170.030.000,-</b>	<b>134.109.100,-</b>	<b>78,87</b>
1	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	170.030.000,-	134.109.100,-	78,87
II	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana</b>	<b>151.050.000,-</b>	<b>147.573.150,-</b>	<b>97,70</b>

	<b>dan Fasilitas LLAJ</b>			
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	70.000.000,-	69.307.500,-	99,01
2	Rehabilitasi pemeliharaan rutin rambu-rambu, traffic, warning light dan marka jalan	81.050.000,-	78.265.650,-	96,56
<b>III</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>868.474.700,-</b>	<b>817.323.501,-</b>	<b>94,11</b>
1	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	276.900.000,-	251.685.632,-	90,89
2	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	414.220.000,-	405.517.412,-	97,90
3	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	70.299.800,-	60.301.453,-	85,78
4	Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan penyuluhan angkutan	0,-	0,-	0
5	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	17.600.000,-	15.961.300,-	90,69
6	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	47.874.900,-	43.901.804	91,70
7	Penertiban dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang	30.000.000,-	28.916.400,-	96,39
8	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	11.580.000,-	11.039.500,-	95,33
<b>IV</b>	<b>Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>581.750.000,-</b>	<b>557.287.211,-</b>	<b>95,79</b>
1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	111.600.000,-	106.614.765,-	95,53
2	Pengadaan Marka Jalan	171.350.000,-	170.908.300,-	99,74
3	Pengadaan tanggul/speed bumps	115.950.000,-	115.514.209	99,62
4	Pengadaan Guardrail	182.850.000,-	164.249.937	89,83
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.771.304.700,-</b>	<b>1.656.292.962,-</b>	<b>93,51%</b>

- ✓ Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 170.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 134.109.100 (78,87%) dialokasikan untuk 4 kegiatan yaitu tim gabungan pengendalian trantib dalam terminal, tim gabungan uji petik angkutan barang dan angkutan orang, tim uji petik ulang laik kendaraan lebaran dan pelaksanaan retribusi terminal (pangkal truk).
- ✓ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan anggaran sebesar Rp. 151.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 147.573.150,- (97,70%) dialokasikan untuk kegiatan rehab/pemeliharaan alat uji 10 unit dan rehab/pemeliharaan fasilitas keselamatan seperti ; rambu-rambu, halte, traffic light.
- ✓ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran sebesar Rp. 868.474.700,- terealisasi sebesar Rp. 817.323.50,- (94,11) dialokasi untuk kegiatan pemungutan retribusi parkir, pengendalian disiplin pengoperasian di jalan raya, pengumpulan data base, penjemputan piala WTN Tanpa Pengecualian, Pemilihan Sopir/Juru Mudi teladan, Pelajar pelopor, dan penertiban/razia angkutan orang dan barang. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai seperti : sewa tempat

parkir dikarenakan belum ada keputusan yang mengikat serta tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas karena pengalihan anggaran pada kegiatan yang urgen yaitu kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan yaitu belanja perjalanan dinas menjemput piala WTN.

- ✓ Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 581.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 557.287.211,- (95,79%) dialokasikan untuk kegiatan pengadaan rambu-rambu, pengadaan marka jalan, pengadaan tanggul/speedbumps dan pengadaan guardrail.

#### 4. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum

Realisasi anggaran program/kegiatan umum tahun 2019 sebesar Rp. 1.149.336.343,- dari target anggaran sebesar Rp. Rp.1.214.614.000,- atau 94,63 %, sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.112.870.000,-</b>	<b>1.062.156.855,-</b>	<b>95,44%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000,-	1.710.000,-	98,28
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.357.779,-	44.357.779,-	86,49
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	319.465.000,-	294.408.570,-	92,16
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	201.500.000,-	192.529.652,-	95,55
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.000.000,-	12.365.500,-	95,12
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57.100.000,-	55.670.500,-	97,50
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.000.000,-	8.823.000,-	80,21
8	Penyediaan makanan dan minuman	19.980.000,-	18.610.200,-	93,14
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	317.000.000,-	316.945.614,-	99,98
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	120.800.000,-	116.736.040,-	96,64
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana dan</b>	<b>50.770.000,-</b>	<b>36.263.000,-</b>	<b>71,43</b>

	<b>Prasarana Aparatur</b>			
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,-	28.337.000,-	94,45
2	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	20.770.000,-	7.926.000,-	38,16
<b>III</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>50.000.000,-</b>	<b>49.949.388,-</b>	<b>99,90</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,-	49.949.388,-	99,90
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>974.000,-</b>	<b>967.100,-</b>	<b>99,29</b>
1	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	674.000,-	669.300,-	99,30
2	Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah	300.000,-	297.800,-	99,27
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.214.614.000,-</b>	<b>1.149.336.343,-</b>	<b>94,63</b>

### **1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sektor perhubungan berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efektif dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan berusaha untuk bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipatif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukkan keberhasilan yang berarti, tercermin dari :

1. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu-rambu, speedbumps, marka, guardrail.
2. Diraihnya penghargaan WTN 2018-2019 Tanpa Pengecualian Kota Padang Panjang.
3. Diraihnya IRSA (Indonesia Road Safety Award) Pertama Kota Padang Panjang.
4. Terpeliharanya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan alat-alat uji kendaraan bermotor.

Kegagalan :

1. Tidak tercapainya target pendapatan diatas 75%



## **2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah**

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2019 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terbatasnya tenaga teknis dan tenaga administrasi;
2. Kurangnya sarana mobilitas pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas;
3. Sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai;
4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan pembekalan kepada petugas operasional lapangan terkait tugas di bidang transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
3. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk pagi di lokasi rawan kecelakaan dan macet.
5. Melakukan pemeriksaan insidentil yang dilaksanakan oleh PPNS Perhubungan yang dilaksanakan secara periodik untuk angkutan barang dan angkutan umum

